

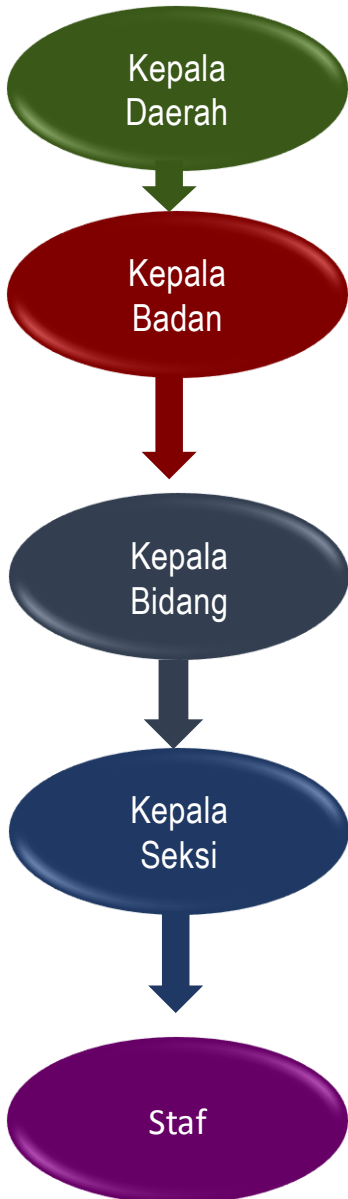
CASCADING BPKAD KAB. LAMONGAN 2021



CASCADING PERENCANAAN BPKAD LAMONGAN

| | | | | |
|------------------------|--|---|---|---|
| Tujuan RPJMD | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik | | | |
| Indikator Tujuan | Indeks Reformasi Birokrasi | | | |
| Sasaran RPJMD | Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah | | | |
| Indikator Sasaran | Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal | | | |
| Tujuan BPKAD | Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan | | | |
| Indikator Tujuan | Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal | | | |
| Sasaran BPKAD | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan | | | |
| Indikator Sasaran | Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan | Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target | Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu | Prosentase Data aset yang akurat |
| Program BPKAD | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Indikator Program | Prosentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat waktu | Prosentase Pelaksanan Pelayanan Penatausahaan Sesuai Standart Daerah | Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD | Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum. |
| Kegiatan BPKAD | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Indikator Kegiatan | jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun | jumlah dokumen laporan BUD yang disusun | jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun | Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun |
| Sub Kegiatan | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Inventarisasi Barang Milik Daerah |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD | Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu | Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten | Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD |

CASCADING KINERJA BPKAD LAMONGAN



| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah</p> <p>Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi</p> | | | |
| <p>Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan 2. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target 3. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu 4. Prosentase Data aset yang akurat | | | |
| <p>Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p> <p>INDIKATOR : jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun</p> | <p>Terwujudnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <p>INDIKATOR : jumlah dokumen laporan BUD yang disusun</p> | <p>Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p> <p>INDIKATOR : jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun</p> | <p>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>INDIKATOR : Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun</p> |
| <p>Terwujudnya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</p> <p>INDIKATOR : Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD</p> | <p>Terwujudnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</p> <p>INDIKATOR : Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu</p> | <p>Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</p> <p>INDIKATOR: Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten</p> | <p>Terwujudnya Inventarisasi Barang Milik Daerah</p> <p>INDIKATOR : Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD</p> |
| <p>Terlaksanya Penelitian dan Verifikasi RKA APBD dan Perubahan APBD</p> <p>INDIKATOR : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Verifikasi RKA APBD dan Perubahan APBD</p> | <p>Terlaksananya pelayanan pencairan belanja SKPD</p> <p>INDIKATOR : Jumlah Dokumen Penerbitan SP2D</p> | <p>Terlaksanya Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun</p> <p>INDIKATOR : Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun</p> | <p>Tersedianya Kelengkapan Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan dalam kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah</p> <p>INDIKATOR : Jumlah laporan hasil konsolidasi Laporan BMD berdasarkan hasil rekon tiap Semester dan Tahunan</p> |